



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.12.05/14
Judul	Keranjang Sampah Pendidikan dan Pemanis Anggaran Kemiskinan	Tanggal	27 September
Sub Judul Event Terkait		Tahun Penulis	2012 YunaFarhan
Kata Kunci	Birokrasi		

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK APBN KESEJAHTERAAN

ASPPUK, KAU, IHCS, Perkumpulan Prakarsa, Seknas FITRA, INDEF, P3M, YAPPIKA, TURC, KIARA, SNI, Perkumpulan Inistaif, KERLIP

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Jakarta Selatan, 12740 Telefax: (021) 7947608, e-

mail: seknas_fitra@yahoo.com ; sekretariat@seknasfitra.org Mail group : fitra@yahoogroup.com,

Website: www.seknasfitra.org & www.budget-info.com

Siaran Pers

Keranjang Sampah Anggaran Pendidikan dan Pemanis Anggaran Kemiskinan

Salah satu fungsi anggaran adalah distribusi, dimana kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, dua sektor penting pendidikan dan kemiskinan seharusnya menjadi cerminan fungsi distribusi anggaran. Faktanya, pada RAPBN 2013 Koalisi menemukan persoalan-persoalan terkait kedua sektor utama tersebut, sebagai berikut :

1. Besarnya anggaran pendidikan tidak berbanding lurus dengan perluasan akses pendidikan berkualitas. Sejak tahun 2009, akhirnya Pemerintah memenuhi amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan, pasca putusan MK yang memasukan komponen gaji. Pada APBNP 2009 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 208,2 trilyun, kemudian dalam kurun waktu 4 tahun, anggaran pendidikan direncanakan meningkat 59% atau Rp 123 trilyun pada RAPBN 2013 menjadi Rp 331,8trilyun. Ironisnya, besarnya peningkatan anggaran pendidikan ini tidak mampu menyelesaikan persoalan pendidikan yang masih karut marut. Sebagaimana diuraikan data berikut :

.

Banyaknya jumlah gedung sekolah yang rusak dan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data Kemendiknas yang dimuat dalam web resminya menunjukkan bahwa secara nasional saat ini kita memiliki 899.016 ruang kelas SD dan sebanyak 293.098 (32,6%) dalam kondisi rusak. Pada tingkat SMP saat ini kita memiliki 298.268 ruang kelas dan 125.320 (42%) ruang kelas dalam kondisi rusak. Bila dilihat dari daerahnya, kelas rusak terbanyak di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 7.652, disusul Sulawesi Tengah 1.186, Lampung 911, Jawa Barat 23.415, Sulawesi Tenggara 2.776, Banten 4.696, Sulawesi Selatan 3.819, Papua Barat 576, Jawa Tengah 22.062, Jawa Timur 17.972, dan Sulawesi Barat 898.

•

Secara umum kualitas dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai harapan. Hingga saat ini baru sekitar 51% berpendidikan S1 sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Selain itu baru 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Hal ini selaras dengan survei yang dilakukan oleh Putera Sampoerna Foundation, dimana sebanyak 54% guru di Indonesia masih berkualitas rendah. Lebih memprihatinkan lagi bahwa dalam sidang Kabinet terbatas di kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan terungkap fakta bahwa dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, ternyata 42,25% masih di bawah rata-rata. Bahkan hal tersebut secara langsung disampaikan oleh Presiden SBY kepada pers. Padahal sebagian besar anggaran pendidikan nasional dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru bahkan setiap tahunnya selalu meningkat.

•

Saat ini angka putus sekolah di Indonesia tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2010 mencapai 1,08 juta anak atau naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring yang dirilis UNESCO 2011, Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam Education Development Index. Pada level Asia, Indonesia tertinggal jauh dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke 34 yang masuk dalam jajaran kelompok dengan skor tinggi bersama Jepang (nomor 1 di Asia). Indonesia hanya mampu berada di atas negara-negara seperti Filipina, Kamboja, India dan Laos.

2. Keranjang Sampah Anggaran Pendidikan. Besarnya anggaran pendidikan juga masih dipandang sebagai proyek semata sekedar bagi-bagi jatah pada berbagai Kemneterian/Lembaga. Pada tahun 2009 misalnya, anggaran pendidikan tersebar hampir di 16 Kementerian/Lembaga yang terkait langsung maupun tidak terkait, bagian anggaran 99 dan 5 jenis dana transfer. Pada RAPBN 2013, anggaran pendidikan tersebar di 19 K/L, bagian anggaran 99 dan 8 jenis transfer daerah serta pembiayaan. Ini menunjukan pos anggaran pendidikan yang semakin bertambah dan menyebar dan terkesan mengada-ada. Sekedar mengklaim sebagai kategori anggaran pendidikan, seperti pada komponen transfer daerah, pemerintah hanya bisa memperkirakan bagian anggaran pendidikan yang diperkirakan dalam DBH, DAU dan Dana Otonomi khusus. Karena faktanya, alokasi anggaran DBH, DAU dan Otsus didaerah tidak bisa dikontrol kebenarannya dialokasikan untuk pendidikan. Sementara hingga saat ini belum ada instrumen monitoring yang mampu mengintegrasikan seluruh laporan sehingga dapat dengan mudah di ukur kontribusi program di masing-masing K/L terhadap tujuan pendidikan nasional .

3. Semakin besar anggaran pendidikan, semakin tidak akuntabel pengelolaannya. Hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2011, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/disclaimer) atas laporan keuangan Kemendikbud dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Kemendikbud menjadi "juara bertahan" dalam hal buruknya pengelolaan keuangan. Setelah pada tahun

sebelumnya juga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/disclaimer). Kemendikbud menjadi satu-satunya Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini TMP dalam dua tahun berturut-turut.. Situasi ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Mengingat Kemendikbud adalah salah satu K/L yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam APBN. Anggaran begitu besar jika dikelola dengan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah penyimpangan besar-besaran. Kementerian yang bertanggungjawab untuk mencetak generasi penerus melalui sistem pendidikan yang berkualitas bisa jadi akan berubah menjadi sarang koruptor.

4. Minimnya angka kemiskinan yang turun di setiap tahun tidak merubah pemerintah dalam mengelola strategi pengelolaan anggaran kemiskinan. Hal itu tergambar di APBN 2011 yang mensyaratkan kemiskinan menjadi 11,5-12,5% dari 13,33% tahun 2010, namun data BPS menunjukkan persentase kemiskinan tahun 2011 hanya turun menjadi 12,49 %, padahal anggaran yang digelontorkan sebesar 84 trilyun tahun 2010, naik dari 80 trilyun di tahun 2009. Di APBN tahun 2013, hampir serupa yang tersebar di sejumlah kementerian. Menurut RPJM, program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi; Bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan program perumahan rakyat. Di APBN 2013, program PKH sebesar: Rp **2.849.900.000.000,-** Sementara itu PNPM tidak mengurangi jumlah totalnya yaitu sebesar Rp **9.794.923.083.000,-** meski tidak banyak berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Disamping itu juga banyak terjadi komplain terhadap masyarakat selain dana terambil dari hutang dan perencanaannya yang masih belum sinergis dengan musrenbang.

5. Yang menyedihkan adalah semakin minimnya dana alokasi KUR bagi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Padahal UMKM merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan. Di APBN 2013 dianggarkan dana KUR (melalui kementerian UMKM dan koperasi) sebesar Rp 17.200.000.000,-. Padahal pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp 52,2 milyar. Sementara itu jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 53.823.732 orang. Maka bila dibagi dengan jumlah UMKM maka tidak akan mencukupi untuk membantunya dalam pengelolaan usaha. Ini persis seperti informasi dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa sebanyak 79 % masyarakat miskin Indonesia tidak memiliki akses kepada keuangan formal, seperti perbankan. Hanya 21% penduduk Indonesia yang berhubungan dengan layanan keuangan formal. (bank dunia, 2012).

6. Ketidaksihlian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM terlihat dari "melempemnya" penguatan kelembagaan yang memberdayakan masyarakat seperti koperasi. Bahkan terkadang kehadiran pemerintah dalam perkembangan koperasi tidak signifikan. Data perkembangan koperasi yang baik di Indonesia sangat lambat. Bahkan ASPPUK pernah menilai pertumbuhan koperasi yang baik dalam satu kabupaten tidak lebih dari 10 koperasi dalam 1 tahun. Padahal koperasi merupakan salah satu lembaga demokratis yang mampu menjadi media pemberdayaan dan perkuatan masyarakat dalam pengembangan UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Namun anehnya anggaran yang tersedia cukup besar di APBN 2013, yaitu Rp **1.450.497.547.000,-**.

Berdasarkan persoalan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan meminta Kepada Anggota DPR untuk mengoptimalkan fungsi anggarannya, untuk:

1. Meminta BPK untuk melakukan audit kinerja terhadap kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang telah berjalan selama 4 tahun untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dari anggaran tersebut.
2. Meminta Kemendikbud menyusun laporan kinerja yang terintegrasi mengenai alokasi anggaran pendidikan yang tersebar dalam berbagai pos menjadi satu kesatuan untuk memudahkan evaluasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.

3. Meminta jaminan kepada Kemendikbud, apabila pada laporan keuangan tahun 2012 kembali mendapatkan opini TMR, maka honor/tunjangan para pejabat di Kemendikbud harus dikurangi sebanyak 50% agar memberikan efek jera pada para pengguna anggaran pendidikan.

4. Diadakan evaluasi menyeluruh tentang penganggaran yang berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya PNPM. Karena sebagian dana PNPM juga adalah hutang negara RI kepada bank dunia. Efektifkan program penanggulangan kemiskinan yang ada yaitu melalui pengembangan UMKM yang integratif.

5. Pemerintah untuk lebih progresif dalam pengembangan UMKM terutama dalam hal permodalan bagi UMKM. Implementasi KUR perlu terus diperbaiki dan lebih ramah terhadap UMKM.

6. Berdayakan koperasi dengan penuh keseriusan, bila perlu koperasi tidak perlu diurus oleh satu kementerian. Karena kementerian untuk koperasi tidak pernah melakukan hal yang konkrit untuk perkembangan koperasi. Justru adanya kementerian koperasi tidak menjadikan koperasi makin berkembang. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk itu bernilai milyaran. Kemana anggaran itu ???

Contact Person:

1. Hendrik Rosnidar (Divisi Advokasi YAPPIKA/ 08111463983)

2. M. Firdaus (Deputi Sekretaris Eksekutif ASPPUK/ 0818944921)